
**POLITIK DINASTI DI INDONESIA: TINJAUAN KRITISISME
IMMANUEL KANT DAN RELEVANSINYA DALAM PENGUATAN
DEMOKRASI**

**Stefanus Suriadi Jadur¹, Perseverando Giano Happy Putra², Aloysius Limbon Narang³,
Antonius Luan⁴, Losianus Harjon⁵**

^{1,2,3,4,5}Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

stefanussuriadi2001@gmail.com¹, gianohappyputra25@gmail.com², oisnarang@gmail.com³,
antoluan2507@gmail.com⁴, harjonlosianus@gmail.com⁵

ABSTRAK

Fenomena politik dinasti di Indonesia menunjukkan adanya paradoks dalam praktik demokrasi Pancasila yang secara normatif menjunjung prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik dinasti di Indonesia melalui perspektif kritisisme Immanuel Kant serta menelaah relevansinya bagi penguatan demokrasi substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengkaji literatur filosofis, teori demokrasi, serta temuan empiris mengenai praktik politik dinasti di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik dinasti tidak hanya merupakan penyimpangan prosedural demokrasi, tetapi juga mencerminkan kegagalan rasionalitas publik dan pelanggaran terhadap prinsip etika politik. Dalam kerangka kritisisme Kant, praktik politik dinasti bertentangan dengan imperatif kategoris yang menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat kekuasaan. Politik dinasti cenderung mereduksi otonomi moral warga, membatasi kesetaraan politik, dan memperlemah kontrol rasional publik terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, penerapan kritisisme Kant relevan sebagai landasan normatif untuk mengkritik kecenderungan postdemokrasi dan mendorong penguatan demokrasi substantif di Indonesia melalui rasionalitas kritis, etika politik, dan partisipasi publik yang egaliter.

Kata Kunci: Politik Dinasti, Demokrasi Pancasila, Kritisisme Immanuel Kant, Etika Politik, Postdemokrasi, Rasionalitas Publik.

ABSTRACT

The phenomenon of political dynasties in Indonesia reveals a paradox within the practice of Pancasila democracy, which normatively upholds popular sovereignty, equality, and justice. This article aims to analyze political dynasties in Indonesia through the perspective of Immanuel Kant's critical philosophy and to examine its relevance for strengthening substantive democracy. This study employs a qualitative approach with a literature review method, analyzing philosophical texts, democratic theories, and empirical studies on political dynasties in Indonesia. The findings indicate that political dynasties represent not merely procedural

deviations from democracy but also a failure of public rationality and a violation of political ethical principles. Within Kant's critical framework, political dynasties contradict the categorical imperative, which asserts that human beings must always be treated as ends in themselves and never merely as means. Dynastic politics tends to undermine citizens' moral autonomy, restrict political equality, and weaken rational public control over power. Therefore, Kantian criticism remains highly relevant as a normative foundation to challenge post-democratic tendencies and to promote the strengthening of substantive democracy in Indonesia through critical rationality, political ethics, and egalitarian public participation.

Keywords: Political Dynasty, Pancasila Democracy, Immanuel Kant's Criticism, Political Ethics, Post-Democracy, Public Rationality.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang semakin populer terutama pada beberapa dasawarsa terakhir ini. Sebagai suatu sistem, demokrasi dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terjadi terutama karena di beberapa negara khususnya beberapa negara berkembang, demokrasi memegang peranan yang sangat penting dan sentral dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik negara. Tidak hanya berkaitan dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di depan umum tanpa ada diskriminasi, tetapi demokrasi juga sangat berkaitan erat dengan terbukanya ruang bagi publik untuk mengawasi jalannya suatu pemerintahan atau kekuasaan.

Di Indonesia, demokrasi menjadi suatu sistem politik yang digunakan dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi dianggap sebagai sistem dan etos yang tepat untuk diterapkan di negara Indonesia. Namun model demokrasi yang digunakan dan dipakai oleh negara Indonesia sedikit berbeda, yakni demokrasi Pancasila. Hal itu terjadi karena demokrasi Pancasila mencerminkan demokrasi berkedaulatan rakyat yang dijiwai kelima sila serta bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana prinsip-prinsip demokrasi disusun sesuai dengan nilai yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah perpaduan antara keuniversalan cita-cita demokrasi dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong (Latif, 2015).

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan demokrasi Pancasila di Indonesia dicerai oleh begitu banyak praktik politik yang menyimpang. Terdapat berbagai macam praktik politik yang tidak lagi sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Praktik-praktik itu menghambat dan sekaligus mencederai demokrasi Pancasila yang dijalankan di Indonesia. Salah satu praktik

politik yang menunjukkan penyimpangan dari prinsip demokrasi ialah fenomena politik dinasti yang semakin marak akhir-akhir ini. Politik dinasti adalah segala macam bentuk atau strategi yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang berbasis hubungan keluarga.

Kehadiran politik dinasti dalam negara berdemokrasi merupakan suatu bentuk penyangkalan terhadap demokrasi. Hadirnya politik dinasti memungkinkan kekuasaan hanya dipegang dan dikendalikan oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan tertentu saja. Tentu kehadiran politik dinasti juga merusak prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan dalam politik (Syatur, dkk., 2023). Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan demokrasi.

Praktik politik dinasti di Indonesia telah ada sejak lama. Fenomena ini telah berkembang sejak zaman orde lama dari keluarga presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, praktik politik dinasti terus berjalan dan semakin marak terjadi baik itu di tingkat daerah maupun nasional. Politik dinasti semakin berkembang dan mengalami modifikasi dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Hal itu tampak dalam praktik politik dinasti yang berkembang dan menjadi sorotan dalam waktu akhir-akhir ini.

Melihat dan menanggapi fenomena tersebut penulis merasa tertarik untuk mengulas lebih jauh bagaimana politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif Kritisisme Immanuel Kant dan kemudian melihat relevansi yang mungkin dari pemikiran Kant tersebut dalam penguatan demokrasi. Penulis menggunakan pisau analisis kritisisme Immanuel Kant untuk menilai dan mengkritisi fenomena tersebut untuk kembali pada konsep demokrasi yang sesungguhnya.

Fenomena politik dinasti di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam berbagai penelitian akademik, terutama karena implikasinya terhadap kualitas demokrasi, partisipasi politik warga, serta prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem politik. Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa praktik politik dinasti cenderung mempersempit ruang kompetisi politik dan memperlemah mekanisme demokrasi substantif. Penelitian yang dilakukan oleh Tanuri Abufatih dkk., misalnya, menegaskan bahwa dominasi kekuasaan keluarga dalam jabatan publik berdampak pada menurunnya pluralisme politik dan partisipasi warga negara, karena akses kekuasaan lebih ditentukan oleh hubungan kekerabatan daripada kapasitas dan legitimasi publik (Tanuri Abufatih dkk., 2024). Studi lain yang berfokus pada demokrasi lokal juga menunjukkan bahwa politik dinasti berkontribusi pada reproduksi

kekuasaan elite, meningkatkan potensi korupsi, serta menghambat sirkulasi kepemimpinan yang sehat dalam sistem demokrasi Indonesia (Dafrin Muksin dkk., 2024).

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bertumpu pada pendekatan empiris-deskriptif, dengan fokus pada aspek hukum, kelembagaan, atau dampak sosial-politik dari politik dinasti. Kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada diagnosis struktural dan institusional, tanpa mengembangkan refleksi normatif yang mendalam mengenai landasan moral dan rasionalitas politik yang memungkinkan praktik dinasti terus bertahan dalam ruang demokrasi. Dalam konteks inilah artikel ini menempatkan diri secara berbeda. Berbeda dari penelitian sebelumnya, tulisan ini menggunakan kerangka kritisisme Immanuel Kant sebagai pendekatan filosofis-normatif untuk membaca politik dinasti tidak hanya sebagai penyimpangan prosedural demokrasi, tetapi sebagai persoalan etika politik dan kegagalan rasionalitas publik. Dengan merujuk pada prinsip imperatif kategoris Kant, khususnya gagasan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan bukan semata sebagai alat, artikel ini menegaskan bahwa politik dinasti secara inheren bertentangan dengan prinsip otonomi moral, keadilan, dan egalitarianisme yang menjadi fondasi demokrasi modern. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang memperdalam pemahaman tentang politik dinasti melalui kritik filosofis yang berorientasi pada penguatan demokrasi substantif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Kajian utama penelitian ini bukan dari penelitian lapangan, tetapi peneliti menganalisa konsep politik dinasti dan didukung dengan sumber referensi dari buku filsafat politik, artikel jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang relevan dengan fenomena politik dinasti. Fenomena ini dianalisis secara mendalam dalam terang pemikiran Kritisisme Immanuel Kant.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Demokrasi secara Umum

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan prioritas pada egalitarianisme, di mana semua warga negara dianggap setara dalam proses pengambilan keputusan publik (Hareva & Hulu, 2020). Sistem pemerintahan demokrasi memungkinkan

partisipasi luas dari seluruh warga negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Prinsip dasar demokrasi adalah menghormati martabat dan harkat manusia.

Secara etimologis, istilah "Demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yakni "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratein*" yang berarti memerintah. Dalam pengertian harfiah, demokrasi dapat dijelaskan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Praktik demokrasi telah ada sejak abad ke-IV SM di Yunani. Pada masa itu, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung (*direct democracy*), yang berarti bahwa hak-hak politik rakyat untuk membuat keputusan dilakukan secara langsung oleh seluruh warga atau rakyat (Hareva & Hulu, 2020).

Demokrasi di Indonesia: Demokrasi (Berideologi) Pancasila

Berbeda dengan pemerintahan otoriter yang menekankan kekuasaan sepenuhnya di bawah kendali pemimpin, dalam demokrasi Pancasila, semua pelaksanaan kekuasaan menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Seluruh fungsi negara harus didasarkan pada nilai-nilai etis Pancasila (Tjarsono, 2013). Konsep demokratisasi di Indonesia mencakup nilai-nilai Pancasila yang harus dihayati dalam sistem pemerintahan. Pancasila memberikan landasan bagi seluruh kehidupan bernegara, dengan Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengadopsi humanisme integral dengan menghargai martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengadvokasi sikap penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman untuk kerja sama dan penghargaan bersama. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, adalah cerminan dari upaya penghargaan terhadap aspirasi dan kritik publik. Dalam hal ini, demokrasi memiliki dasar konseptual-teoretis (Tjarsono, 2013). Seluruh proses pengambilan kebijakan harus menghormati mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mencerminkan filosofi untuk bersikap adil terhadap semua individu dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Mengamati sistem demokrasi di Indonesia yang didasarkan pada ideologi Pancasila, setidaknya terdapat empat elemen kekuatan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan (Madung, 2013). Pertama, demokrasi memungkinkan adanya kebebasan individual, termasuk

kebebasan menyuarakan aspirasi, berorganisasi, dan berkumpul. Negara demokrasi dijamin konstitusional dalam memberikan kebebasan individual. Kedua, demokrasi menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses pengambilan kebijakan publik, di mana warga menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara terlibat baik secara langsung, seperti dalam pemilihan umum, maupun secara tidak langsung melalui perwakilan di badan legislatif. Ketiga, demokrasi beroperasi berdasarkan prinsip persaingan tanpa represi, memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan usaha tanpa hambatan. Keempat, demokrasi menitikberatkan pada cara-cara yang efisien, transparan, dan fleksibel dalam menangani masalah-masalah sosial, dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang mengutamakan transparansi atau keterbukaan. Meskipun demikian, menurut penulis, demokrasi sebenarnya merupakan sistem pemerintahan yang paling menantang saat ini. Tantangan terbesar demokrasi adalah hadirnya klaim kebenaran tunggal dalam ruang publik (Tan, 2018).

Demokrasi di Indonesia disusun berdasarkan Pancasila, yang menjadi dasar dan pedoman etis untuk seluruh praktik demokrasi. Sila-sila Pancasila berfungsi sebagai penjaga agar nilai-nilai etis Indonesia tetap terjaga dan tidak tergusur oleh paham radikalisme warga negara yang mencoba mengklaim kebenaran-kebenaran Tunggal (Budiarjo, 2008).

Situasi Postdemokrasi di Indonesia

Collin Crouch menyatakan bahwa saat ini, demokrasi mengalami pergeseran dari kelompok masyarakat menengah yang memiliki kesadaran politik dan kepedulian dalam membangun sistem politik yang adil, manusiawi, dan setara. Perubahan ini dipicu oleh munculnya kelompok baru yang mengambil peran dalam masyarakat. Berbeda dengan karakteristik kelas menengah yang mendorong demokrasi, kelompok baru ini lebih condong pada populisme untuk mendukung kekuasaan eksklusif, terutama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah (Noor, 2017).

Di Indonesia, sistem demokrasi yang diterapkan masih cenderung bersifat prosedural daripada substansial. Hal ini mengakibatkan makna atau nilai-nilai demokrasi belum mencapai tingkat yang diharapkan. Dampaknya, isu-isu seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi permasalahan serius dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan postdemokrasi

dapat dilihat dalam tiga indikator, yaitu meningkatnya pengaruh militer dalam ranah sipil, segregasi sosial berdasarkan identitas ideologi, dan keberlanjutan dinasti politik.

Permasalahan favoritisme politik yang berkembang menjadi kecenderungan politik dinasti, menjadi tanda terakhir dari kemunduran dalam demokrasi. Dampaknya adalah peningkatan ketergantungan yang kemudian diubah menjadi dukungan publik terhadap petahana (Ihsanuddin, 2020). Oleh karena itu, pemilu menjadi platform legitimasi bagi penguasa dan keluarganya, menunjukkan bahwa kemampuan dalam menangani berbagai persoalan memberikan dampak positif terhadap elektabilitas calon dari keluarga inti.

Permasalahan ini sebenarnya merupakan masalah klasik ketika peran partai politik mengalami penurunan drastis sementara personalisasi tokoh semakin kuat (Warburton, 2019). Akar personalisasi politik ini berdampak pada kecenderungan untuk lebih memprioritaskan atau memfavoritkan anggota keluarga inti sebagai pengganti. Data dari KPU menunjukkan bahwa ada 16 pasangan kandidat kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elit politik petahana di Jakarta, termasuk terpilihnya Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi, sebagai Walikota Medan, dan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, sebagai Walikota Solo (Arlina, 2020).

Konsep Politik Dinasti

Politik dinasti adalah sistem politik di mana sekelompok orang yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan mengendalikan kekuasaan. Mereka terus-menerus memperbaharui kekuasaan untuk kepentingan kelompok mereka dan mempertahankan dominasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinasti merujuk pada keturunan raja-raja yang memimpin negara dan berasal dari satu keluarga, meskipun dalam konteks pemerintahan Indonesia yang bukan monarki, istilah politik dinasti muncul. Opini masyarakat terhadap politik dinasti cenderung menyebabkan kekhawatiran karena berpotensi mengganggu stabilitas negara dengan menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan terhadap sistem politik. Sementara politisi melihatnya sebagai tantangan serius karena bisa mempengaruhi penilaian rendah terhadap kualitas sistem pemerintahan. Politik dinasti cenderung mempertahankan kekuasaan dengan cara yang tidak etis dan memungkinkan transfer kekuasaan secara turun-temurun, dengan fokus pada kepentingan pribadi dan kurangnya integritas (Syaur, dkk., 2023).

Keberadaan politik dinasti memungkinkan individu tanpa kompetensi memperoleh kekuasaan, sementara individu yang kompeten harus menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mendapatkan kesempatan serupa. Meskipun proses pemilihan pemimpin di Indonesia berlangsung secara demokratis, kekuatan politik dari elit serta dukungan loyalis juga dapat menyebabkan transfer kekuasaan secara turun-temurun. Oleh karena itu, politik dinasti dianggap tidak konsisten dengan prinsip demokrasi karena dapat menghasilkan monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang yang terkait secara keluarga, merusak prinsip kesetaraan dan hak-hak demokratis. Ini memicu perdebatan tentang pluralisme yang menekankan perlindungan terhadap kekuasaan dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi (Syatur, dkk., 2023).

Dinamika Politik Dinasti di Indonesia

Makna politik dinasti mirip dengan nepotisme karena keduanya merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif, bergantung pada keluarga dan keturunan sejumlah individu tertentu. Individu ini sering disebut sebagai bagian dari kelompok elit. Di Indonesia, kelompok elit terdiri dari individu yang memiliki kualitas unggul dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Ini memudahkan mereka dalam mendapatkan atau bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Politik dinasti juga tidak sejalan dengan makna Sila ke-2 Pancasila karena dapat menghambat kesempatan terpilihnya individu lain yang memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi pemerintahan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa anggota keluarga atau kerabat dari individu elit tidak memiliki kualitas yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsi politik mereka, sehingga sistem meristokrasi dalam pemilihan jabatan kekuasaan tidak berfungsi.

Politik dinasti di Indonesia telah menjadi bagian integral dalam politik sejak lama. Sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan adanya politik dinasti di 61 wilayah di Indonesia, yang setara dengan 11 persen dari total wilayah. Menurut *Nagara Institute*, pada tahun 2020, persentase politik dinasti meningkat menjadi 14,78 persen, mencakup 80 wilayah dari total 541 wilayah di Indonesia. Fenomena ini terus berkembang setiap kali Pilkada serentak dilakukan, menunjukkan bahwa politik dinasti bukanlah hal baru, tetapi fenomena yang terus berkembang dari waktu ke waktu (Sucipto, dkk., 2023).

Fenomena politik dinasti dan nepotisme di Indonesia telah ada sejak zaman Orde Lama, dimulai dari keluarga Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keturunan Soekarno seperti Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, dan Guruh Soekarno melanjutkan warisan politiknya. Hal serupa terjadi dalam keluarga Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), di mana saudara-saudaranya serta anak-anaknya terlibat dalam politik. Megawati Soekarnoputri juga menunjukkan ciri-ciri politik dinasti melalui keterlibatan aktif Puan Maharani dalam politik Indonesia, bahkan hingga menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengikuti pola serupa, dengan banyak anggota keluarga seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Eddie Baskoro, Hartanto Edhie Wibowo, Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, dan Agung Budi Santosa, terlibat dalam politik Indonesia (Sucipto, dkk., 2023).

Meskipun sudah ada peraturan yang menangani masalah nepotisme dan politik dinasti di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan ketentuan yang jelas mengenai hal ini, realitasnya menunjukkan bahwa praktik politik dinasti dan nepotisme terus berkembang. Harapan bahwa fenomena ini akan berkurang dengan terpilihnya Jokowi sebagai pemimpin, karena latar belakangnya bukan dari keluarga elit politik, ternyata tidak terwujud. Jokowi, yang awalnya diharapkan dapat mengakhiri praktik-praktik tersebut, juga terlihat telah terpengaruh oleh praktik politik dinasti masa lalu yang melibatkan nepotisme. Dia memberikan restu kepada anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai walikota Solo. Tidak hanya itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution, juga maju sebagai walikota Medan.

Kritisisme Immanuel Kant

Filsafat kritisisme adalah sintesis/kombinasi dari rasionalisme dan empirisme, juga dikenal sebagai kritisisme Kant karena Kant adalah tokoh pertama yang mengkritik dan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut (Soelaiman & Rahmad, 2019). Intinya, kritisisme merupakan penyatuan antara pandangan rasionalisme dan empirisme. Pada abad ke-18, Kant berusaha memecahkan konflik antara rasionalisme dan empirisme. Awalnya, dia cenderung ke arah rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh oleh gagasan empirisme (Muliadi, 2020).

Kant memandang bahwa rasionalisme dan empirisme tidak mampu secara sendirian menghasilkan pengetahuan yang lengkap, karena menurutnya pengenalan manusia melibatkan

unsur-unsur apriori dan aposteriori. Filsafat kritisisme yang dikembangkan oleh Kant menggabungkan rasio dan pengalaman secara harmonis, sehingga pengetahuan yang benar tidak hanya bersumber dari *a priori* saja, tetapi juga dari *a posteriori*, dan bukan hanya dari akal budi, tetapi juga dari pengalaman indrawi. Poin penting dalam kritisisme adalah pandangan Kant tentang teori pengetahuan, etika, dan estetika (Budi, 2016).

1. Kritik atas rasio murni taraf indrawi

Pada kritik rasio murni, fokusnya adalah pada akal budi dan pengalaman indrawi, bertanya, "Apakah yang bisa saya ketahui?" Unsur apriori mempengaruhi bentuk, sementara aposteriori mempengaruhi materi. Kant menekankan bahwa unsur apriori telah ada dalam pengalaman indrawi. Dua bentuk apriori utama adalah ruang tempat objek berada, yang bukanlah "ruang an sich", dan waktu, yang tidak statis untuk pengindraan. Kedua unsur ini berasal dari struktur subjek itu sendiri. Pandangan ini memiliki konsekuensi signifikan: meskipun realitas ada di luar subjek, Kant berpendapat bahwa "das ding an sich" (benda dalam dirinya) selalu tersembunyi sebagai sesuatu yang tak dapat diketahui. Kita hanya dapat mengenal fenomena, hasil sintesis unsur-unsur eksternal dengan waktu dan ruang (Abidin, 2008).

Kant menyatakan bahwa pengetahuan yang mutlak benar tidak hanya berasal dari pengamatan indra. Kebenaran *a priori* mungkin terwujud melalui akal murni, yang tidak tergantung pada pengalaman. Kant bertanya apakah pengetahuan masih mungkin jika objek dan indra dihapus. Dia berpendapat bahwa pengetahuan manusia berasal dari pencerapan yang mengumpulkan data dan pemahaman yang mengolahnnya. Keduanya saling melengkapi: tanpa pencerapan, tidak ada data; tanpa pemahaman, data tidak diproses. Namun, pandangan Kant ini hanya berfokus pada pengetahuan untuk pengetahuan, tanpa mempertimbangkan implikasinya dalam kehidupan praktis manusia. Ia menggabungkan rasionalisme dalam pernyataan logis dan matematis dengan empirisme dalam pengamatan indrawi, tetapi tidak mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari (Achsin, 2008).

2. Kritik Atas Rasio Murni taraf Akal Budi

Kritik terhadap rasio murni pada taraf akal budi membahas pertanyaan tentang sifat manusia. Manusia dianggap memiliki kemampuan untuk merenungkan eksistensinya dan dunia, yang membedakannya dari binatang yang tidak memiliki kapasitas serupa.

Kemampuan manusia untuk mencari dan bertanya tentang makna hidup membuatnya unik. Ilmu-ilmu humaniora, khususnya filsafat, memberikan berbagai jawaban tentang esensi manusia. Manusia dapat didefinisikan dalam berbagai konteks, seperti *homo faber*, *homo sapiens*, dan lainnya (Putri, dkk., 2022).

Dalam karya "The Critique of Pure Reason," Kant membela ilmu pengetahuan dan menolak keraguan skeptisisme, berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dapat dibenarkan jika didasarkan pada *a priori*, terutama melalui akal murni. Manusia memainkan peran penting dalam memahami realitas, yang diformat oleh pemahaman kita. Kant menganggap tujuan utama manusia berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat semata. Manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, dan memiliki kemampuan untuk membentuk realitasnya sendiri melalui akal budi dan kehendak otonom (Putri, dkk., 2022).

3. Kritik atas Rasio Praktis

Kritik terhadap rasio praktis membahas pertanyaan tentang langkah apa yang harus diambil. Pandangan Kant tentang etika, juga dikenal sebagai deontologi, menyoroti karakter manusia. Etika, yang berasal dari bahasa Yunani "ethos", juga dikenal sebagai filsafat moral, berfokus pada tindakan manusia dan sifat moralitasnya (Durasa, 2023).

Sejak awal sejarah manusia, moralitas telah menjadi fokus penelitian dalam bidang etika. Terdapat dua teori yang menjelaskan bagaimana perilaku manusia dapat diukur secara etis: deontologi dan teologis. Kant adalah pemikir di balik teori deontologi, yang menekankan kewajiban. Menurut teori ini, perilaku dapat dianggap baik jika dilakukan berdasarkan "imperatif kategoris". Kant menjelaskan bahwa manusia memiliki beberapa cara untuk memenuhi kewajibannya: karena keuntungan, karena perasaan, atau karena keinginan sendiri. Kewajiban, menurut Kant, tidak ditentukan oleh realitas empiris, tetapi oleh imperatif kategoris, yang merupakan perintah mutlak dan tidak bersyarat (Abidin, 2008).

Berdasarkan Kant, penilaian perilaku moral harus didasarkan pada tingkat ukuran maksim, tanpa mempertimbangkan tujuan atau konsekuensinya. Ini dikenal sebagai "deontologi", sebuah teori tentang kewajiban tanpa memperhatikan konsekuensi. Kant menegaskan bahwa perilaku yang tidak otonom bukanlah tindakan moral karena

kebebasan manusia terletak pada kesadaran, dan moralitas dapat dibuktikan melalui kesadaran hati nurani.

4. Postulat Rasio Praktis

Postulat rasio praktis membahas harapan apa yang bisa dipertimbangkan. Kebebasan merupakan kenyataan yang tidak diragukan lagi, dan hal ini secara langsung mempengaruhi kesadaran moral. Postulat, sebagai sesuatu yang tak dapat dibuktikan melalui pengalaman empiris, tetap memiliki keberadaan yang tak terbantahkan karena realitas yang tidak mungkin terjadi tanpanya. Kesadaran moral menunjukkan bahwa kita memiliki kehendak bebas, kemampuan untuk bertindak tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti rangsangan, dorongan, atau emosi (Dahlan, 2009).

Kant menambahkan dua postulat: keabadian jiwa dan eksistensi Tuhan. Keabadian jiwa diperlukan agar kita dapat mencapai Kebaikan Tertinggi, yang tidak dapat dicapai di dunia ini, sedangkan eksistensi Tuhan adalah kebaikan tertinggi yang harus diyakini, karena Tuhan adalah hakim atas semua perbuatan kita. Meskipun Kant adalah seorang filsuf yang terutama berfokus pada etika dan epistemologi, pandangannya terhadap Tuhan dan agama tetap menjadi perhatian. Baginya, penafsiran tentang Tuhan harus dimulai dari pemikiran, dan ia mencoba menggabungkan empirisme dan rasionalisme dalam pembuktian tentang keberadaan Tuhan.

Kant menganggap Tuhan bukan hanya isu teoritis, tetapi juga isu moral, praktis, dan esensi kehidupan. Tuhan menjadi konsekuensi moralitas, dan agama Kant tidak membutuhkan kepercayaan tertentu. Menurut Kant, Tuhan dapat didekati melalui iman yang berlandaskan pada hukum moral (dampak positifnya). Namun, hukum moral juga membutuhkan keabadian jiwa, kebebasan, dan eksistensi Tuhan (Effendi, 2020).

Melampaui Politik Dinasti di Indonesia: Tinjauan Kritisisme Immanuel Kant Dan Relevansinya dalam Penguatan Demokrasi

Dalam pandangan kritisisme Immanuel Kant, esensi demokrasi adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada dialog kritis, bukan demi keuntungan pribadi, melainkan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan demokrasi seharusnya adalah untuk menciptakan pemimpin yang berkomitmen sebagai 'negarawan', bukan sekadar 'politisi'. Di Indonesia saat ini, terdapat banyak politisi namun

kurang pemimpin yang memiliki visi kebangsaan. Oleh karena itu, menjadi seorang negarawan hanya dapat dicapai melalui kesungguhan dan integritas, sehingga demokrasi memandang pemanfaatan berbagai sumber daya komunikasi, termasuk manusia, infrastruktur, dan teknologi, untuk mendorong terwujudnya sistem politik yang mengedepankan kekuasaan rakyat dan melindungi hak-hak minoritas. Dengan demikian, demokrasi menjadi cita-cita yang mulia yang sejalan dengan nurani, dan dapat diabdikan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk mengambil keuntungan pribadi atau memanipulasi konstitusi demi kepentingan kelompok tertentu.

Menurut pandangan penulis kritisisme Immanuel Kant adalah pisau analisis yang tepat untuk membedah fenomena politik dinasti yang ada di Indonesia. Dengan singkat, penulis berpendapat bahwa konsep kritisisme sejalan dengan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, konsep kritisisme adalah pisau kritik terhadap kecenderungan postdemokrasi, secara khusus situasi politik dinasti. Artinya, kritisisme Immanuel Kant adalah suatu konsep yang digunakan untuk mereduksi kecenderungan politik dinasti sehingga demokrasi Indonesia tidak mengalami disrupsi. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Kant mengatakan bahwa pikiran manusia memiliki konsep-konsep dasar yang diperoleh sebelum pengalaman, seperti ruang, waktu, dan kausalitas (Putri, dkk., 2022). Konsep-konsep ini membentuk struktur dasar bagi pengalaman kita. Dalam konteks politik dinasti, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kritik terhadap dominasi politik oleh keluarga tertentu yang membatasi keragaman dalam realitas politik. Kant menganggap dominasi politik dinasti sebagai hegemoni ruang. Ini berarti bahwa penguasaan politik oleh keluarga-keluarga tertentu menghambat pemahaman kita tentang dimensi politik yang lebih luas dan alternatif-alternatif yang mungkin.

Familisme, sebagai budaya politik, adalah kecenderungan untuk terlalu bergantung pada hubungan keluarga. Hal ini menciptakan kebiasaan di mana keluarga dan ikatan kekerabatan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada tanggung jawab sosial lainnya. Familisme juga dapat diartikan sebagai bentuk tatanan sosial baru di mana individu merangkul karier di dua bidang sekaligus: sektor publik sebagai birokrat dan sektor privat sebagai pebisnis swasta (Gunanto, 2020). Berpartisipasi dalam politik seharusnya bukanlah upaya untuk memperoleh kekuasaan semata, tetapi untuk mempromosikan dan mengembangkan gagasan-gagasan yang membangun masyarakat. Melalui demokrasi, gagasan-gagasan kebangsaan dapat dijaga dan

direalisasikan melalui proses pemikiran kritis, sehingga dapat diwujudkan oleh masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Praktik politik dinasti dianggap sebagai sebuah penyakit dalam sistem demokrasi. Hal ini melemahkan pengawasan terhadap pemerintahan, yang merupakan elemen penting dalam negara demokratis. Banyak pengamat politik menyebut sistem politik dinasti sebagai bentuk oligarki politik, di mana elit politik berasal dari hubungan darah atau perkawinan tertentu. Di Indonesia, elit politik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik dan seringkali mendominasi dalam kontes politik.

Kedua, Kant menyoroti pentingnya kewajiban moral dan etika dalam perilaku manusia (Putri, dkk., 2022). Dalam konteks politik dinasti, kritiknya menyoroti bagaimana penguasaan yang terpusat pada satu keluarga atau dinasti dapat mengaburkan prinsip-prinsip etika kepemimpinan dan keadilan politik. Dalam situasi ini, individu atau anggota keluarga politik yang terlibat dalam politik cenderung memperjuangkan kepentingan pribadi atau keluarga mereka. Dalam politik, perilaku egois bisa berarti mereka mengejar posisi kekuasaan demi kepentingan pribadi atau keluarga, bukan demi kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemanfaatan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi dapat melanggar prinsip-prinsip moral yang menekankan pelayanan kepada masyarakat dan keadilan dalam representasi politik. Dengan menggunakan perspektif egoisme, kita dapat mengevaluasi apakah motivasi di balik partisipasi keluarga politik dalam politik didasarkan pada keinginan untuk mencari keuntungan pribadi atau demi kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat.

Kant mengkritik politik dinasti dengan menunjukkan bahwa dominasi politik oleh satu keluarga dapat mengabaikan kewajiban moral dan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Kehadiran politik dinasti ini memunculkan keprihatinan terkait ketidaksetaraan dalam pembagian kekuasaan politik, yang bisa mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis di politik. Ini dikenal sebagai konsep "kekuasaan melahirkan kekuatan." Kehadiran dinasti politik dalam sebuah negara bisa menjadi ancaman bagi demokrasi dan merusak prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan dalam politik. Ini terjadi karena kekuatan politik dan ekonomi dari keluarga politik yang berlangsung dari generasi ke generasi, yang dapat memperkuat dominasi atau monopoli

kekuasaan dari kelompok elit politik tertentu dan membatasi partisipasi politik warga negara lainnya.

Dalam dinamika dinasti politik di Indonesia, timbul pertanyaan etika mengenai hak-hak politik individu yang mungkin terbatas karena pengaruh dominan dari keluarga politik yang berkuasa. Keterlibatan yang konsisten dari anggota keluarga politik tertentu dalam ranah politik mungkin menghambat partisipasi individu lain yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sama tanpa adanya rintangan yang tidak adil. Prinsip-prinsip hak asasi manusia menekankan perlunya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses politik tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Praktik dinasti politik yang memberikan keistimewaan dan akses yang lebih besar kepada anggota keluarga politik dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia dalam demokrasi.

Ketiga, Kant mengemukakan gagasan tentang sintesis akal, di mana manusia menggunakan akal untuk menyatukan data pengalaman menjadi pemahaman yang konsisten (Putri, dkk., 2022). Dalam konteks politik dinasti, Kant menyoroti pentingnya melakukan analisis kritis terhadap fenomena politik untuk memahami akar permasalahannya. Ini mengisyaratkan bahwa sebagai masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam demokrasi, kita harus memelihara keseimbangan dalam sistem demokrasi dengan mengawasi pergerakan elit politik dalam pemerintahan.

Dalam situasi ini, kritik menjadi standar utama bagi masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap elit politik yang berkuasa, sehingga kecenderungan politik dinasti bisa ditekan sekecil mungkin. Dalam sistem pemerintahan demokratis, kritik mencerminkan upaya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan bentuk dari ruang publik yang berdeliberasi, yang pada gilirannya membuka peluang untuk menyampaikan argumentasi yang rasional dalam menguji kebijakan umum.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa sintesis akal yang diterapkan dalam konteks politik dinasti mengarah pada perlunya masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengawasan dan penilaian terhadap tindakan pemerintah. Dengan menggunakan alat analisis kritis, masyarakat dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi akar penyebab dominasi politik oleh keluarga tertentu, serta memahami dampaknya terhadap kesetaraan dan keadilan dalam sistem politik. Selain itu, melalui proses kritik yang konstruktif, masyarakat dapat

mengembangkan mekanisme kontrol yang lebih efektif untuk meminimalkan praktik politik dinasti dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

D. KESIMPULAN

Politik dinasti telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia, menciptakan ketidaksetaraan status sosial dalam kontestasi politik dan memicu kecacatan etika serta representasi demokratis. Meskipun demokrasi menempati peran sentral dalam mencapai tujuan bersama, keberadaan politik dinasti dapat mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menganjurkan pencarian kebenaran melalui deliberasi dan kritik yang berkelanjutan. Dalam perspektif kritisisme Immanuel Kant, demokrasi dan kritisisme memiliki kesamaan prinsip, di mana upaya untuk mencapai kebenaran dan keseimbangan merupakan proses yang terus-menerus dan memerlukan argumentasi yang kritis. Kritisisme menjadi alat untuk merobek kecenderungan politik dinasti, memperjuangkan kembali esensi demokrasi yang sesungguhnya. Dengan demikian, kritisisme memberikan landasan argumentatif untuk melawan berbagai bentuk postdemokrasi yang merugikan, seperti pemerintah otoritatif, pembatasan kebebasan berpendapat, dan peningkatan peran militer dalam urusan sipil. Dalam konteks Indonesia, memahami kritisisme Immanuel Kant dan menerapkannya secara konsisten dapat memperkuat sistem demokrasi dan memitigasi dampak negatif dari politik dinasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. "Pemikiran Filsafat Immanuel Kant". *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(2), 2008.
- Abufatih, Tanuri dkk. (August 2024). Dismantling Political Dynasties: Transformation of Pancasila Democracy in the Context of Family Power. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 9 (2). <https://journal.unnes.ac.id/journals/jpi/article/view/4655>
- Achsin. "Dampak Positivisme Terhadap Esensi Penciptaan Manusia". *Jurnal TEMA* 1, no. 7, 2006.
- Arlina. (2020, December 14). Jokowi's Son-in-Law, New Medan Mayor, Is No Stranger to the Limelight. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jokowis-son-in-law-new-medan-mayor-is-no-stranger-to-the-limelight>

- Budi, S. (2016). "Epistemologi Perspektif Islam dan Barat". *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 8(2).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, M. (2009). Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8(1).
- Durasa, H. (2023). Peran Filsafat Moral dalam Memanusiakan Manusia dan Urgensinya dalam Pendidikan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2).
- Effendi, R. (2020). Kewajiban Dalam Pemikiran Immanuel Kant Dan Relevansinya Dengan Akhlak Islam. *Ilmu Aqidah Filsafat*, 12(2).
- Warburton, E. (2019). Polarization and Democratic Decline in Indonesia. in Thomas Carothers and Andrew O'Donohue. *The Global Challenge of Political Polarisation*. Brookings Institution Press.
- Gunanto, D. (2020) "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia". *SAWALA: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2).
- Harefa, Darmawan dan Fatolosa Hulu. *Demokrasi di Era Kemajemukan*. Banyumas: Publisher, 2020.
- Ihsanuddin. (2020, October 24). Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/24/21300901/jokowi-ungkap-alasan-ruu-cipta-kerja-dikebut-di-tengah-pandemi?page=all>.
- Madung, O. G. (2013). *Filsafat Politik, Negara dalam bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Muhsin, Dafrin dkk. (2024). The Impact of Political Dynasty Practices on Indonesian Local Democracy. *Journal of Government and Politics*, 6(2). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/27770>
- Muliadi. (2020). *Filsafat Umum*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Noor, F. (2017). *Fenomena Post Democracy Parti Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik Dan Dampaknya*. Jakarta Selatan: LIPI.
- Putri, A. R. M. dkk. (2022). Empat Persoalan Filsafat Menurut Immanuel Kant. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2).
- Soelaiman dan Rahmad. (2019). *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

- Sucipto, H. dkk. (2023). Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(3).
- Syanur, A. D. M. dkk. (2023). Politik Dinasti Di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 3, no. 1, 2023.
- Tan, P. (2018). *Paradoks Politik, Pertautannya dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai.
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenita”. *Jurnal Transnasional*, 4(2).